

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Bandung.

Achmad Ali, 2009, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta:Sinar Grafika

Agusmidah, et. al., 2012 *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar

Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta.

Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor.

Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum diIndonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Imam Soepomo, 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.

I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Muhammad Sadi Is, 2015 *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, Makassar AS Publishing

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Muhammad Sadi Is, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta, Kencana
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undan-Undang Perdata*, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara, Eddisi Revisi*, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang ketenagakerjaan*, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Fkator-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta.
- Sukirman dan Mirnawati, 2019, *Tabir Keadilan: Kumpulan Esai Hukum dan Politik Indonesia*, Aksara Timur, Gowa.
- Suwarto, 2003, *Hukum Industrial dalam Peraktek*, Jakarta.
- Van Apeldoorn ,L J.Inleading tot de Studien Van het nederlandse recht W. E. J. Tjeenk Wilink, Zwolle, 1996, hlm 9-10 dikutip oleh Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.
- Zainal Asikin dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal /Artikel/Internet:

- Bahder Johan Nasution dalam Fithriatus Shalihah, Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia, *Jumal Selat*, Volume. 4, Nomor. 1, Oktober 2016
- Feni Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (

jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1, 2013)

Marsha Chikita Widyarini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT Fajar Graha Pena Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin.

Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, cetakan pertam, Surabaya; *PT. Bina Ilmu, dalam Masri Nalole, Peranan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BAPERAM) dalam Mengatasi Insider Trading di Pasar Modal*, Tesis Universitas Hasanuddin.

Darwati dan Aziz Budiarto, *Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST)*, Lex Publica, Volume IV, No. 31, November 2017

PERUNDANG-UNDANGAN:

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peran tenaga kerja dalam pembangunan , diases dari <https://disnakertrans.kalteng.go.id>, pada tanggal 29 Oktober 2020

Feni Natalia Khoe, *Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1, 2013), hal..3..

Wawancara dengan Mediator Ketenagakerjaan Kota Makassar, bapak Sudra, pada tanggal Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sundra, Mediator Madya pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, pada tanggal Mei 2023.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 69 Telp./Fax (0411) 595190-590435
MAKASSAR 90245

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0702056 /Disnakertrans

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERGIWAN EDY, S.E.**
NIP : 19801026 201001 1 017
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Subbagian Umum Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

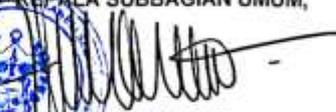
Dengan ini menyatakan bahwa Nama Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **AKBAR**
Nomor Pokok : B012212057
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan penelitian/pengumpulan data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyusunan Tesis dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR".

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

Makassar, 09 Juni 2023

KEPALA SUBBAGIAN UMUM,

ERGIWAN EDY, S.E.
Pangkat : Penata (III/c)
NIP: 19801026 201001 1 017



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
Laman dpmptsp.makassar.go.id Pos-el dpmptsp@makassar.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/412/SKP/DPMPSTSP/V/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16691/S.01/PTSP/2023 Tanggal 15 Mei 2023;
5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/419-II/BKBP/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama : **AKBAR**
NIM / Jurusan : **B012212057 / Ilmu Hukum**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S2) / UNHAS**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar**
Lokasi Penelitian : **Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar**
Waktu Penelitian : **23 Mei s/d 15 Juni 2023**
Tujuan : **Tesis**
Judul Penelitian : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKEJAJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR"**

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpsdlayrikeshongpslms@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Makassar, 26 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://ite.kominfo.go.id/verifyPDF>





PT. DINAR WISESA MAHAKARYA

Email: pdinar.wisesamahakarya@gmail.com

Nomor : 010/SKTMP/DWM/V/2023
Lampiran : 1 (Berkas)
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamka
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Akbar
Nomor Pokok : B012212057
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah selesai melakukan penelitian di perusahaan kami PT. Dinar Wisesa Mahakarya selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 12 April 2023 s/d 11 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis Penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan di Kota Makassar"

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan dan ditanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Mei 2023
PT Dinar Wisesa Mahakarya


PT. DINAR WISESA MAHAKARYA
Hamka
Direktur



PT. Mitra Duta Mahakarya

BTN Mangga Tiga Blok F3/15, Kel. Paccerakkang, Daya - Makassar 90241, Telepon : 0823 4874 2001
Email : mitradutamahakarya@gmail.com

Nomor : 014/SKTMP/MDM/V/2023
Lampiran : 1 (Berkas)
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwis S.

Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Akbar

Nomor Pokok : B012212057

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah selesai melakukan penelitian di perusahaan kami PT. Mitra Duta Mahakarya untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis Penelitian yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan di Kota Makassar**".

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan dan ditanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Mei 2023
PT. Mitra Duta Mahakarya


Darwis S.
Direktur

